

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama pada negara agraris. Selain kebutuhan pangan, manusia juga membutuhkan produk pertanian untuk mencukupi kebutuhan terhadap energi terbarukan, bahan industri pangan, kosmetik maupun farmasi (Yuwono dkk., 2018). Menurut Todaro (2000), dalam pembangunan pertanian diperlukan tahap-tahap berikut:

1. Pertanian tradisional, yaitu dimana sebagian output dikonsumsi sendiri oleh keluarga petani, produk andalannya adalah biji-bijian, dan tingkat produktifitasnya rendah.
2. Penganekaragaman produk pertanian, tahap ini disebut juga pertanian campuran. Penganekaragaman produk pertanian merupakan suatu langkah yang logis dalam masa transisi dari pertanian tradisional ke pertanian modern.
3. Pertanian modern, yaitu menggambarkan tingkat pertanian yang paling maju.

Sektor pertanian erat kaitannya dengan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan paradigma yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan pembangunan pertanian pada umumnya. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan

mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan system (produksi, distribusi, konsumsi) pangan sendiri sesuai dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing – masing (Syahyuti dkk., 2015).

Secara teoritis, pembangunan pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan jumlah ketersediaan pangan dan perbaikan akses atau daya beli terhadap pangan. Peningkatan produktivitas dan perbaikan pendapatan petani berkontribusi pada perbaikan ekonomi perdesaan, sehingga akses dan daya beli terhadap bahan pangan juga meningkat (Arifin, 2013). Sektor pertanian juga memiliki kaitan dengan kemiskinan. Menurut Cervantes dan Dewbre (2010) perkembangan di sektor pertanian memiliki dampak yang nyata dalam pengurangan kemiskinan, terutama di pedesaan. Dampak tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan adanya peningkatan di sektor industri (O’Ryan dkk., 2003). Hal itu dikarenakan mayoritas penduduk desa bekerja pada sektor pertanian.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Banyumas terdiri atas tiga sub sektor, yaitu sub sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian; kehutanan dan penebangan kayu; dan perikanan. Sub sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian terdiri atas sub sub sektor tanaman pangan, hortikultura semusim, perkebunan semusim, hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan. (BPS Kabupaten Banyumas, 2018)

1. Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

A. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan, seperti padi dan palawija. Keseluruhan komoditas tersebut berupa produksi pada saat panen ataupun produksi baku yang masih termasuk dalam kategori pertanian. Contoh produksinya adalah Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung pipilan kering,

B. Tanaman Hortikultura Semusim

Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang berumur pendek. Dalam satu kali penanaman, panen dilakukan satu kali atau beberapa kali. Contoh komoditasnya yaitu tomat, terong, timun, bawang, kubis, cabai, kentang, kol, lobak, wortel, bayam, buncis, jamur, kacang panjang, dan labu siam.

C. Tanaman Hortikultura Tahunan

Tanaman hortikultura tahunan yakni tanaman hortikultura yang berumur lebih dari satu tahun. Dalam satu kali penanaman, panen dilakukan beberapa kali. Komoditas yang dihasilkan tanaman hortikultura tahunan seperti nangka, pepaya, pisang, durian, rambutan, mangga, manggis, duku, salak, nanas, melinjo, petai, jengkol, jeruk, alpukat, dan jambu.

D. Tanaman Perkebunan Semusim

Tanaman perkebunan semusim hanya dapat dipanen satu kali dalam satu siklus hidup. Tanaman ini diusahakan oleh rakyat atau perkebunan (negara atau swasta). Komoditas yang dihasilkan yaitu tebu, kapas, dan tembakau.

E. Tanaman Perkebunan Tahunan

Tanaman perkebunan semusim dapat dipanen lebih dari satu kali dalam siklus hidupnya. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan tahunan diantaranya adalah kako, cengkeh, kelapa sawit, maupun lada.

F. Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, ataupun diambil hasilnya. Peternakan juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu segar, dan sebagainya.

G. Jasa Pertanian dan Perburuan

Meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan

usaha atas dasar balas jasa atau kontrak untuk menunjang kegiatan pertanian. Sedangkan, kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Cakupannya seperti usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, unggas hasil perburuan dan penangkapan, perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, penelitian, ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan.

2. Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu

Sub sektor ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu, pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, dan jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa atau kontrak. Komoditas yang dihasilkan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya.

3. Sub Sektor Perikanan

Sub sektor ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan serta biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah).

B. Produk Domestik Regional Bruto

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional (Putri dan Dwisetya, 2013). Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan di provinsi, kota, atau kabupaten adalah dengan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah hasil akhir dari semua kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua produsen pada skala regional. PDRB dapat dikatakan pula sebagai catatan tentang jumlah nilai rupiah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian di suatu daerah dalam waktu satu tahun (Suparmoko, 2007).

Perhitungan PDRB merupakan hal yang penting untuk menganalisis perekonomian dalam suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka – angka PDRB tersebut sebagai indikator ekonomi makro dan juga sebagai landasan evaluasi kinerja perekonomian, dan penyusunan berbagai kebijakan (Rahman dan Ayunda, 2015).

Kenaikan maupun penurunan pendapatan masyarakat di suatu daerah dapat digambarkan melalui kenaikan dan penurunan angka pendapatan regional dalam beberapa tahun. Kenaikan atau penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor berikut (Tarigan, 2009) :

1. Kenaikan atau penurunan riil, yaitu faktor perubahan harga tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan tingkat pendapatan. Sehingga, apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk, artinya daya beli penduduk di daerah tersebut juga meningkat.
2. Kenaikan atau penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan oleh inflasi maka walaupun pendapatan penduduk meningkat, tetapi belum tentu jumlah barang yang mampu dibeli juga meningkat.

Pendapatan regional yang didalamnya masih terdapat unsur inflasi dinamakan pendapatan regional atas harga berlaku. Sedangkan, pendapatan regional tanpa memasukkan unsur inflasi disebut pendapatan regional atas harga konstan. Harga konstan berarti harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan sebagai patokan untuk penentuan harga disebut tahun dasar. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, sebab harga dianggap konstan (tetap). Sejak tahun 2004, data PDRB yang disajikan oleh BPS menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar dari 1993 menjadi 2000 dilakukan karena struktur perekonomian Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, meliputi perkembangan harga, cakupan komoditas produksi maupun konsumsi serta jenis dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Laju pertumbuhan ekonomi pada umumnya diukur dari kenaikan nilai konstan (Tarigan, 2009).

Terdapat dua metode perhitungan pendapatan regional, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli. Sedangkan, metode tidak langsung menggunakan data yang bersumber dari nasional lalu dialokasikan ke daerah. Metode langsung dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Tarigan, 2009) :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu sektor ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (*output*) dan nilai biaya antara (*intermediate cost*), yaitu bahan baku dari luar yang dipakai dalam proses produksi. Unit-unit produksi ini dalam penyajian BPS dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor) yakni :

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, gas, dan air bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, hotel dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah)

2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan ini, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan segi pengeluaran adalah jumlah nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Total penyediaan atau produksi barang dan jasa itu digunakan untuk :

- a. Konsumsi rumah tangga
- b. Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung
- c. Konsumsi pemerintah
- d. Pembentukan modal tetap bruto (investasi)

Pertumbuhan ekonomi regional dapat terjadi akibat faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor yang berasal dari dalam daerah, seperti karakteristik daerah tersebut. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar daerah, misalnya keterkaitan kegiatan ekonomi (*linkage*) antar daerah sekitarnya, khususnya daerah yang berbatasan langsung dengan daerah tersebut (Putri dan Dwisetya, 2013).

C. Kemiskinan

Secara luas, kemiskinan merupakan keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas, atau negara, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, tempat tinggal yang tidak layak, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Irianto dan Friyatmi, 2016). Sedangkan, menurut BPS kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan dan non makanan yang dihubungkan dengan pemenuhan kalori makanan dan kemiskinan non makanan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya (Jacobus dkk., 2018). Berdasarkan kondisi tersebut, kemiskinan dibagi dalam 4 bentuk, yakni (Jacobus dkk., 2018) :

1. Kemiskinan absolut, yakni suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau kelompok berada dibawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan standar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
2. Kemiskinan relatif, keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin jika dibandingkan dengan orang atau kelompok lain. Keadaan tersebut dapat terjadi karena adanya ketimpangan pendapatan atau standar kesejahteraan.

3. Kemiskinan kultural, yaitu bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakmauan seseorang untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kebiasaan ini dapat berupa sikap malas, pemboros, kurang kreatif dan bergantung pada orang lain.
4. Kemiskinan struktural, adalah keadaan dimana kemiskinan disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang ada. Bentuk kemiskinan ini memiliki terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Konsep kemiskinan yang paling banyak digunakan dalam perspektif ekonomi yakni kemiskinan pendapatan (*income poverty*) (Lisna dkk., 2013). Hal tersebut dikarenakan kemiskinan pendapatan lebih terukur dan berkaitan dengan indikator perekonomian lainnya. Melalui konsep ini, kemiskinan diukur sebagai ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), baik berupa kebutuhan makanan dan non makanan, yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (*poverty line*). Konsep tersebut juga dikenal dengan kemiskinan absolut. Pengukuran kemiskinan absolut yang dilakukan oleh BPS merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dll). Sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan

diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan. Penentuan garis kemiskinan ini juga bermanfaat untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan presentase penduduk miskin (*headcount index* – P_0), indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* – P_1), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* – P_2). (BPS, 2011).

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) terdapat beberapa indikator kemiskinan, salah satunya adalah *head-count index* (P_0). Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk yang tergolong miskin (Lisna dkk., 2013). Interpretasi serta pengukuran yang mudah, menjadikan indikator ini sangat populer dan banyak digunakan. Namun demikian, indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah tingkat kemiskinan yang terjadi, sebab ukuran ini tetap atau tidak berubah jika seseorang yang miskin bertambah miskin (Leasiwal, 2013). Bentuk matematis *head-count index* (P_0) adalah sebagai berikut :

$$P_0(y_i; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^0 \text{ atau } P_0 = q/n$$

Keterangan :

y_i = Nilai rata-rata pengeluaran individu per kapita ke i dalam rumah tangga yang telah diranking berdasarkan tingkat pengeluaran

n = Total populasi

q = Jumlah populasi miskin.

z = Batas kemiskinan

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan. Menurut Muhadjir (2005), faktor yang menyebabkan kemiskinan, yakni :

1. Faktor Budaya (*Cultural factor*)

Kemiskinan disebabkan dari dalam diri seseorang ataupun masyarakat dan tidak disebabkan oleh faktor luar. Pandangan ini menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan jebakan budayanya sendiri, kemudian diwariskan secara turun-temurun. Beberapa hal yang menjebak dan membentuk budaya kemiskinan adalah watak malas, mengabaikan masa depan, dan hidup berdasarkan kebutuhan pragmatis.

2. Faktor Struktural (*Structural factor*)

Kemiskinan struktural terjadi karena kebijakan negara yang dianggap tidak menguntungkan. Kelompok miskin akan semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju ke system yang dihegemoni oleh kekuatan modal. Sistem ekonomi pasar yang tidak terkendali dapat memarginalkan kelompok miskin, karena hanya segelintir elit yang menguasai asset ekonomi.

3. Konflik Sosial

Ketidakstabilan kondisi sosial dan politik berpengaruh terhadap kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Instabilitas tersebut membuat investor enggan menanamkan modalnya dan juga terjadi pelarian modal ke luar negeri. Lapangan kerja pun akan menjadi terbatas, sehingga pengangguran meningkat karena adanya PHK besar-besaran.

4. Faktor Alam

Faktor alam yang menyebabkan kemiskinan yaitu apabila kondisi alam kering, tandus, terisolir dan tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Bencana alam seperti longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit yang menyerang warga juga termasuk kedalam faktor alam yang menyebabkan kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya terjadi dikota besar, tetapi juga di pedesaan.

Penyebab kemiskinan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan menurut Suryawati (2005) disebabkan oleh terbatasnya beberapa hal berikut :

1. *Natural assets* , seperti tanah dan air.
2. *Human assets*, menyangkut kualitas sumber daya manusia yang rendah.
3. *Physical assets*, minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
4. *Financial assets*, berupa tabungan dan akses memperoleh modal usaha.
5. *Social assets*, dalam hal ini berkaitan dengan kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan – keputusan politik.

D. Distribusi Pendapatan

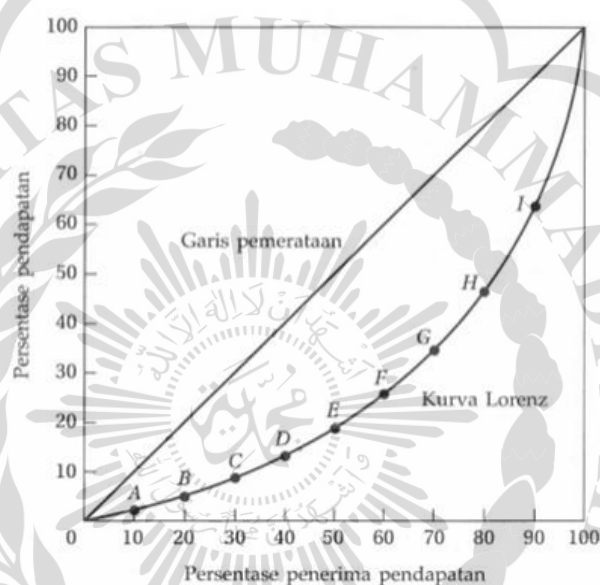
Distribusi pendapatan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan untuk melihat tinggi rendahnya kesejahteraan suatu wilayah. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara, baik yang diterima oleh tiap individu atau dari kepemilikan faktor produksi dikalangan penduduknya. Menurut Suparmoko dan Sofilda (2016) distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu distribusi pendapatan individual (*size distribution*) dan distribusi pendapatan secara fungsional (distribusi faktor).

1. Distribusi pendapatan individual, menyangkut mengenai pendapatan perorangan tanpa mempersoalkan cara mendapatkan dan besaran pendapatan tersebut.
2. Distribusi pendapatan fungsional, menyangkut bagaimana faktor produksi dibayar atas jasa-jasa yang disumbangkan dalam proses produksi.

Kemiskinan dan distribusi pendapatan memiliki kaitan yang erat. Jika makin banyak penduduk miskin di suatu wilayah, maka dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut makin timpang (Yuwono dkk., 2018). Distribusi pendapatan dapat diukur dengan menggunakan kurva Lorentz, Indeks Gini atau Kriteria Bank Dunia.

1. Kurva Lorentz

Kurva Lorentz digambarkan dalam suatu kotak dimana sumbu horizontal menunjukkan presentase penerimaan pendapatan dan sumbu vertikal menyatakan total pendapatan yang diterima masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut (Todaro, 2000). Kurva Lorentz digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kurva Lorenz

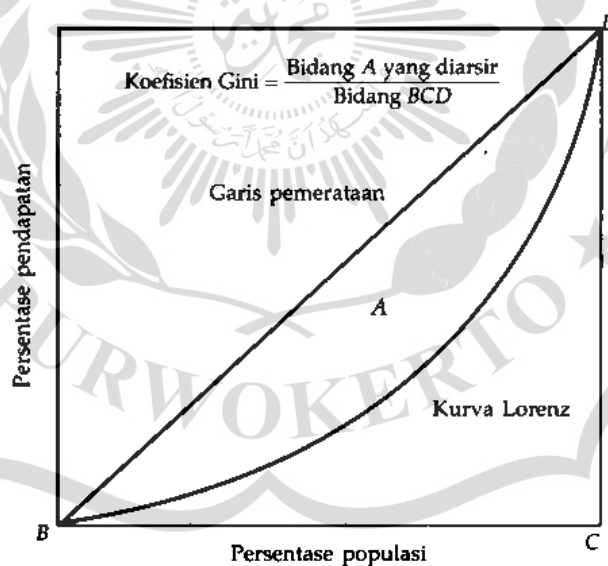
Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, 50 persen pendapatan dinikmati oleh 50 persen penduduk.

Penentuan tingkat ketimpangan dilihat dari jarak kurva ke garis diagonal. Semakin dekat jarak kurva Lorenz, maka semakin merata pendapatannya. Sebaliknya, semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin timpang atau tidak merata distribusi

pendapatannya. Jika semakin parah tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan, maka bentuk kurva Lorentz akan semakin melengkung mendekati sumbu horizontal (Todaro, 2000).

2. Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan) agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Pengukuran tersebut didapat dari penghitungan rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorentz, kemudian dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva Lorentz itu berada (Todaro, 2000). Contoh perhitungannya, seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Perkiraan Koefisien Gini

Semakin besar nilai indeks gini, maka semakin besar pula ketidakmerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah (Suparmoko dan Eleonora, 2016). Nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni :

- a. Nilai indeks gini kurang dari 0,4 termasuk dalam ketimpangan rendah.
- b. Nilai indeks gini antara 0,4 – 0,5 termasuk dalam ketimpangan moderat.
- c. Nilai indeks gini lebih dari 0,5 termasuk dalam ketimpangan tinggi.

3. Kriteria Bank Dunia

Ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria bank dunia diukur melalui indikator ketimpangan relatif (*relative inequality*). Penghitungan tersebut merupakan penjumlahan presentase pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah, kemudian dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Bank Dunia mengelompokkan penduduk kedalam 3 kategori berdasarkan besarnya pendapatan, yakni :

- a. Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah
- b. Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah
- c. Kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi

Sedangkan, indikator ketimpangan ditentukan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Tingkat ketimpangan tinggi (*high inequality*), jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kelompok 40 persen terendah, terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.
- b. Tingkat ketimpangan sedang (*moderat inequality*), jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kelompok 40 persen terendah,

terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12 hingga 17 persen.

- c. Tingkat ketimpangan rendah (*low inequality*), jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kelompok 40 persen terendah, terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik mengenai kontribusi sektor pertanian, kemiskinan, dan distribusi pendapatan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Murohman dkk., (2014) berjudul “Peranan Sektor Ekonomi dalam Pengantasan Kemiskinan di Kalimantan Barat”, yang menggunakan analisis I-O Miyazawa dan dekomposisi indeks kemiskinan FGT (Foster-Greer-Thorbecke) menurut tipe dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian berperan penting dalam pembentukan output, penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan rumah tangga. Dekomposisi penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa sektor industri berdampak langsung dan memiliki dampak paling besar terhadap penurunan kemiskinan. Sedangkan, sektor pertanian, terutama tanaman pangan dan perkebunan, memiliki dampak total paling besar terhadap penurunan kemiskinan di Kalimantan Barat.

2. Penelitian oleh Fortunika dkk., (2017) berjudul “Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Banjarnegara”, yang menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan analisis keterkaitan ke depan dan ke belakang, koefisien penyebaran dan kepekaan penyebaran, dampak angka pengganda dan analisis sektor pemimpin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian yang didominasi oleh subsektor tanaman pangan berkontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjarnegara.
3. Penelitian oleh Hermawan (2012) berjudul “Analisis Eksistensi Sektor Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan” yang bertujuan menganalisis peran sektor pertanian dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan dan perkotaan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif yang dilakukan yakni menggunakan regresi berganda (*multiple regression*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan. Sedangkan, sektor industri berperan dalam mengurangi kemiskinan di perkotaan. Sektor pertanian menjadi *leading sector* dan kunci dalam mengurangi kemiskinan secara agregat, sebab kemiskinan terbesar terdapat di pedesaan.

4. Penelitian yang dilakukan Kalalo dkk., (2016) berjudul “Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara”. Penelitian ini menggunakan analisis dengan indeks gini dan kurva Lorentz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendistribusian pendapatan pada golongan pedagang dan PNS lebih merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan golongan petani dan buruh.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ponto dkk., (2015) berjudul “Analisis Korelasi Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif sebesar $-0,879$ antara sektor pertanian dan tingkat kemiskinan, sehingga apabila PDRB sektor pertanian tinggi maka tingkat kemiskinan akan menurun.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Cervantes-Godoy, D. and J. Dewbre (2010) yang berjudul “*Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction*” yang melakukan analisis terhadap 25 negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan ekstrim selama 20 hingga 25 tahun terakhir. Hasil penelitian menggunakan analisis *time series* dan regresi *cross section* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang penting dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan berbagai sektor terutama sektor pertanian, memiliki peran penting dalam pengurangan angka kemiskinan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh O' Ryan et al (2003) yang berjudul "*The Role of Agriculture in Poverty Alleviation, Income Distribution, and Economic Development : A CGE Analysis for Chile*" yang membahas dampak peningkatan produktivitas capital terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan. Peneliti ini menggunakan analisis CGE dan menunjukkan bahwa peningkatan di sektor pertanian dan agroindustry akan memperbaiki distribusi pendapatan. Kelompok rumah tangga miskin memperoleh peningkatan pendapatan yang lebih besar dibandingkan kelompok kaya.

